

INKLUSIVITAS TANPA PARTISIPASI: STUDI KUALITATIF TENTANG RENDAHNYA KUNJUNGAN PENYANDANG DISABILITAS KE PERPUSTAKAAN NASIONAL MESKIPUN FASILITAS SUDAH RAMAH DISABILITAS

Muhammad Idzharulhaq Volasoohy¹, Marlini¹

¹Fakultas bahasa dan seni, Universitas Negeri Padang, Padang, Sumatera Barat, 25131, Indonesia

Article Info

Article History

Received : 23 November 2025

Revised : 05 Desember 2025

Accepted : 19 Desember 2025

Published : 31 Desember 2025

Keywords: Layanan Inklusif, Penyandang Disabilitas, Perpustakaan, Partisipasi Pengguna, Aksebilitas

Corresponding Author:

Muhammad Idzharulhaq Volasoohy

Email:

muhammadidzharulhaqvolasoohy@gmail.com

Abstract

Perpustakaan memiliki peran penting dalam menyediakan akses informasi yang inklusif bagi penyandang disabilitas, namun ketersediaan fasilitas ramah disabilitas belum sepenuhnya diikuti oleh tingginya partisipasi pengguna. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas layanan inklusif serta faktor penyebab rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam memanfaatkan layanan perpustakaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivisme, melibatkan pustakawan layanan disabilitas sebagai informan yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan mobilitas, minimnya sosialisasi, keterbatasan koleksi aksesibel, dan kompetensi pustakawan memengaruhi rendahnya partisipasi. Kesimpulannya, layanan inklusif perlu dikembangkan secara holistik dan partisipatif sebagai dasar pengabdian kepada masyarakat.

Abstract

Libraries play an important role in providing inclusive access to information for persons with disabilities, but the availability of disability-friendly facilities has not been fully matched by high user participation. This study aims to analyse the effectiveness of inclusive services and the factors causing low participation of persons with disabilities in utilising library services. The study uses a descriptive qualitative approach with a constructivist paradigm, involving librarians who provide services to persons with disabilities as informants selected purposively. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, then analysed thematically. The results showed that mobility limitations, lack of socialisation, limited accessible collections, and librarian competence influenced low participation. In conclusion, inclusive services need to be developed holistically and participatively as a basis for community service.

Journal Net. Library and Information (JNLI)

E.ISSN: 3089-5464

Vol. 2 No. 2 Desember, 2025 (Hal. 79-86)

Homepage: <https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/jnli>

DOI: <https://doi.org/10.51544/jnli.v2i2.6661>

How To Cite: Volasoohy, M. I., & Marlina, M. (2025). Inklusivitas Tanpa Partisipasi: Studi Kualitatif Tentang Rendahnya Kunjungan Penyandang Disabilitas Ke Perpustakaan Nasional Meskipun Fasilitas Sudah Ramah Disabilitas. *Journal Net. Library and Information (JNLI)*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.51544/jnli.v2i2.6661>



Copyright © 2025 by the Authors, Published by Program Studi: Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Komunikasi dan Perpustakaan Universitas Sari Mutiara Indonesia. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 Licence ([Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)).

1. Pendahuluan

Perpustakaan merupakan lembaga publik yang berperan penting dalam menyediakan akses informasi bag kalangan masyarakat tanpa terkucali. Dalam kontrks inklusivitas perpustakaan di tuntutan untuk memastikan bahwa setiap idndividu, termasuk penyandang disabilitas, memilki kesempatan yang setara dalam mendapatkan manfaat dan berkotrubusi terhadap pengetahuan. Akses informasi yang setara bukan hanya pemenuhan hak dasar manusia tetapi juga mencerminkan pelaksanaan prinsip sustainable development gols (SDGs) nomor 10 tentang pengurangan kesenjangan sosial. Dengan demikian, inklusivitas dalam pelayanan perpustakaan tidak hanya bersifat moral, tetapi juga menjadi tanggung jawab intional dan kebijakan nasional. Inklusivitas tanpa partisipasi menggambarkan situasi ketika layanan perpustakaan yang inklusif hanya fokus pada penyediaan akses, sementara pengguna, khususnya kelompok rentan, tidak dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pengembangan layanan. Akibatnya, inklusivitas tersebut cenderung bersifat formalitas dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan serta pengalaman pengguna yang nyata.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau disebut Perpustnas sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk mengembangkan literasi telah berupaya menerapkan konsep layana inklusif melalui penyedia berbagai fasilitas ramah disabilitas. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain menyediakan koleksi Braille, audiobook, CCTV low vision, blok pemandu, serta fasilitas umum lain bagi penyandang disabilitas (Mokhtar, 2021). Upaya tersebut menunjukkan komitmen Perpustnas dalam mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas di ruang literi publik. Namun, layanan disabilitas di Perpustnas hingga saat ini masih lebih menitikberatkan pada penyediaan fasilitas fisik dan koleksi, sementara aspek partisipasi pengguna penyandang disabilitas dalam layanan perencanaan, pengembangan, dan evaluasi belum menjadi perhatian utama. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat pemanfaatan layanan, karena layanan yang tersedia belum sepenuhnya berangkat dari pengalaman, kebutuhan, dan preferensi nyata penyandang disabilitas sebagai pengguna.

Berbagai penelitian sebelumnya mengungkap bahwa rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam memanfaatkan layanan publik bukan hanya disebabkan oleh keterbatas fasilitas, tetapi juga oleh faktor sosial dan psikologis dan budaya (Hidayat, 2020). Penyandang disabilitas sering mengalami hambatan kumunikasi, keterbatasan

mobilitas, dan stigma sosial yang membuat mereka enggan mengakses ruang publik seperti perpustakaan. Di sisi lain faktor internal seperti kompetensi pustakawan, pemahaman terhadap kebutuhan disabilitas, serta strategi promosi layanan juga turut memengaruhi tingkat keterlibatan pengguna. Layanan inklusif sangat ditentukan oleh kemampuan pustakawan dalam memberikan pelayanan yang empatik dan komunikatif sesuai karakteristik pengguna. Sayangnya, banyak perpustakaan masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dalam hal pelatihan bahasa isyarat, orientasi mobilitas, maupun pemahaman psikososial kondisi ini menunjukkan bahwa inklusivitas perpustakaan sering kali masih berhenti pada tataran fisik dan belum menyentuh aspek sosial interaksi yang esensial.

Fenomena inklusivitas partisipasi tanpa keterlibatan menggambarkan situasi ketika fasilitas dan kebijakan inklusif telah tersedia, namun belum berhasil mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas. Dalam literatur internasional, kondisi ini dikenal sebagai *inclusive services with low utilization* (Brunskill, 2020). Ketersediaan fasilitas aksesibel tidak secara otomatis menjamin peningkatan partisipasi, karena partisipasi yang bermakna hanya dapat tercapai apabila pengguna merasa dihargai, nyaman, memiliki rasa kepemilikan, serta memperoleh dukungan sosial dari lingkungan perpustakaan.

Sejalan dengan hal tersebut, IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) menegaskan bahwa layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas tidak boleh berhenti pada penyediaan akses fisik semata, melainkan harus mencakup pendekatan berbasis hak, pemberdayaan, dan inklusi sosial. (International Federation of Library Associations & Institutions, 2021) IFLA menekankan pentingnya keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam perencanaan layanan, penyediaan staf yang memiliki sensitivitas dan kompetensi inklusif, serta penciptaan lingkungan perpustakaan yang ramah, aman, dan bebas stigma. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur fisik perlu berjalan beriringan dengan pembangunan sosial dan kultural agar tercipta pengalaman literasi yang benar-benar inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam mengapa tingkat kunjungan penyandang disabilitas ke layanan inklusif perpustakaan nasional masih rendah meskipun fasilitas telah disediakan secara memadai. Kajian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi layanan inklusif serta memberikan rekomendasi praktis bagi pengembang kebijakan yang lebih partisipatif penyandang disabilitas dalam memanfaatkan layanan tersebut. (Rifa et al., 2023)

Dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana efektivitas pelaksanaan layanan inklusif di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia serta faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam memanfaatkan layanan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam dinamika rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam memanfaatkan layanan inklusif di perpustakaan, menganalisis penyebab baik dari sisi internal maupun eksternal serta merumuskan strategi dan rekomendasi kebijakan agar layanan inklusif di perpustakaan dapat berjalan lebih partisipatif, responsif dan berkelanjutan bagi seluruh kelompok pengguna, termasuk penyandang disabilitas.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivisme untuk memahami secara mendalam dinamika rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam memanfaatkan layanan inklusif di perpustakaan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada makna, pengalaman, dan persepsi sosial informan terhadap implementasi layanan disabilitas, bukan pada pengukuran hubungan antarvariabel secara kuantitatif (Creswell, 2014; Sandelowski, 2000). Penelitian dilaksanakan pada unit layanan khusus lansia dan disabilitas di sebuah lembaga perpustakaan nasional dalam periode waktu tertentu. Informan penelitian adalah pustakawan yang bertugas langsung pada layanan tersebut dan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pengalaman, keterlibatan, serta pemahamannya terhadap kebijakan layanan inklusif (Patton, 2002). Penelitian ini tidak melibatkan intervensi karena bukan merupakan studi eksperimental, melainkan bertujuan menggambarkan praktik layanan yang telah berjalan secara empiris.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi nonpartisipan, dan telaah dokumentasi terkait layanan disabilitas. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengaitkan temuan empiris pada kerangka teori inklusi sosial dan aksesibilitas. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, serta penyajian deskripsi konteks penelitian secara rinci untuk menjamin kredibilitas dan transferabilitas temuan. Penelitian ini memperhatikan prinsip etika penelitian dengan memperoleh persetujuan dari informan, menjaga kerahasiaan identitas, serta telah mendapatkan persetujuan dari komite etik penelitian kesehatan lembaga terkait, sehingga seluruh proses penelitian dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai kaidah akademik.

3. Hasil & Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pustakawan layanan lansia dan disabilitas di Perpustakaan Nasional, diketahui bahwa lembaga ini telah menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung aksesibilitas pengguna penyandang disabilitas, khususnya bagi pengguna tunanetra (Brunskill, 2020). Fasilitas yang tersedia meliputi koleksi braille, buku audio (audiobook), komputer berbicara, CCTV low vision, guiding block, toilet difabel, area parkir khusus, serta kursi roda. Penyediaan fasilitas tersebut disampaikan langsung oleh informan sebagai bagian dari komitmen institusi dalam mewujudkan layanan perpustakaan yang inklusif. Sebagaimana diungkapkan oleh pustakawan layanan lansia dan disabilitas, “Perpustakaan Nasional sudah berupaya menyediakan sarana yang dapat diakses oleh pengguna disabilitas, terutama tunanetra, agar mereka dapat menggunakan layanan perpustakaan secara mandiri”. Penyediaan fasilitas ini merupakan bentuk implementasi prinsip universal design dalam ruang perpustakaan, yang bertujuan menciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan dapat digunakan oleh semua kalangan tanpa diskriminasi.

Meskipun secara fisik fasilitas tersebut tergolong lengkap, tingkat pemanfaatannya masih rendah. Pustakawan yang di wawancarai menyebutkan bahwa koleksi braille dan audiobook memang di gunakan tetapi perangkat seperti CCTV low vision jarang di gunakan. Dengan ini menunjukan adanya kesenjangan antara ketersediaan fasilitas dan

tingkat partisipasi pengguna. Fenomena ini sejalan dengan temuan Wahyuni dan Hartono yang menyatakan bahwa fasilitas ramah disabilitas di perpustakaan sering kali bersifat simbolik belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh pengguna sasaran (Handari, 2019).

Keterbatasan mobilitas merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kunjungan penyandang disabilitas ke perpustakaan. Pengguna tunanetra, khususnya, masih memerlukan pendamping dalam menjangkau lokasi perpustakaan yang belum sepenuhnya terhubung dengan sistem transportasi publik yang aksesibel. Temuan ini terungkap dari hasil wawancara, di mana informan menyampaikan bahwa hambatan transportasi dan ketergantungan pada pendamping menjadi kendala utama dalam mengakses layanan perpustakaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menegaskan bahwa keterbatasan mobilitas serta belum tersedianya sistem transportasi yang inklusif menjadi tantangan signifikan dalam pemanfaatan layanan publik oleh penyandang disabilitas.

Selain faktor mobilitas, kebutuhan spesifik pengguna juga memengaruhi frekuensi kunjungan penyandang disabilitas ke perpustakaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pustakawan layanan disabilitas, diketahui bahwa pengguna penyandang disabilitas umumnya datang ke perpustakaan hanya ketika memiliki kebutuhan tertentu, seperti menggunakan komputer berbicara atau mencari koleksi braille. Informan menjelaskan bahwa “pengguna disabilitas biasanya datang kalau ada keperluan khusus, misalnya ingin memakai komputer berbicara atau membutuhkan koleksi braille”. Temuan ini menunjukkan bahwa perpustakaan belum sepenuhnya berfungsi sebagai ruang sosial yang inklusif bagi penyandang disabilitas, melainkan masih dipersepsikan sebagai ruang yang bersifat fungsional. Sejalan dengan pandangan tersebut, Subekti menegaskan bahwa konsep inklusivitas seharusnya tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas akses, tetapi juga mengembangkan ruang partisipatif yang mampu membangun rasa kepemilikan bagi komunitas disabilitas.

Umpan balik pengguna terhadap fasilitas lebih banyak berkaitan dengan keterbatasan jumlah koleksi braille dan audiobook. Mereka para pengguna layanan menginginkan variasi bacaan yang lebih luas. Seperti novel atau teks dalam bentuk audio. Kondisi ini mencerminkan masih rendahnya proporsi bahan pustaka adaptif di bandingkan koleksi umum. Menurut Suhendar produksi bahan pustaka dalam format aksesibel seperti braille atau audiobook masih terkendala biaya, sumber daya manusia, serta hak cipta.

Pihak perpustakaan melakukan pembaruan koleksi braille dan audiobook secara berkala, namun belum melakukan pembaruan signifikan terhadap fasilitas teknologi atau sarana fisik. Hal ini mengidentifikasikan adanya ketimpangan dalam prioritas pengembangan layanan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rahajo yang mengatakan keberlanjutan layanan inklusif membutuhkan perencanaan holistik yang meliputi pemeliharaan fasilitas, pelatihan petugas, serta evaluasi kebutuhan pengguna.

Pelatihan bagi pustakawan dan staf menjadi aspek penting dalam mendukung pelayanan inklusif. Narasumber menyebutkan bahwa pelatihan terakhir dilakukan pada tahun 2018 dan belum ada kegiatan lanjutan. Padahal, pelatihan tersebut mencakup keterampilan dasar seperti orientasi mobilitas dan cara berinteraksi dengan pengguna netra. Studi oleh Anwar dan Kurniawati menunjukkan bahwa kompetensi pustakawan dalam menghadapi pengguna disabilitas secara langsung berpengaruh terhadap kenyamanan dan

kepuasan pengguna (Anwar & Kurniawati, 2022)

Selain itu, keterbatasan kemampuan bahasa isyarat di antara pustakawan menjadi hambatan ketkan melayani pengguna tuli. Narasumber mengakui bahwa komunikasi menjadi sulit karena tidak ada petugas yang memahami bahasa isyarat. Situasi ini memperlihatkan perlunya kebijakan pengembangan kapasitas pustakawan agar mampu melayani beragam jenis disabilitas. Sebagaimana dijelaskan pelayanan pustakawan yang inklusif harus mencakup kemampuan komunikasi adaptif sesuai jenis disabilitas pengguna

Kunjungan penyandang disabilitas ke layanan ini relatif rendah, rata-rata hanya satu hingga dua orang per hari. Jumlah tersebut menunjukan bahwa layanan belum mapu menarik partisipasi yang luas. Rendahnya angka partisipasi ini mencerminkan fenomena yang disebut *inclusivity without participation* , yaitu kondisi ketika lembaga telah menyediakan fasilitas inklusif, namun komunitas sasaran belum aktif berpartisipasi. Penyebab rendahnya partisipasi ini juga berkaitan dengan factor sosialisasi. Narasumber menjelaskan bahwa tidak semua penyandang disabilitas mengetahui keberadaan layanan ini. Stratrgi promosi mesih terbatas pada kegiatan webinar, kerja sama komunitas dan promosi dari mulut ke mulut. Padahal, penting nya strategi komunitas digitla yang melibatkan komunitas disabilitas dalam kampanye inklusif perpustakaan

Selain sosialisasi, faktor lingkungan sosial juga memangruhi partisipasi. Banyak penyandang disabilitas yang mesih meras canggung atau tidak percaya diri untuk datang ke perpustakaan karena terdapat stigma di sekitar masyarakat. Persepsu negatif di masyrakat terhadap disabilitas dapat menurunkan motivasi individu difabel untuk berpartisipasi dalam ruang publik, termasuk perpustakaan(Oliver, 1990)

Perpustakaan telah berupaya menciptakan kegiatan inklusif seperti tlak show, workshop seni,dan kelas menulis bagi penyandang disabilitas. Namun kegiatan ini cendrung bersifat temporer, belum teriritegrasi dalam progaram kerja tahunan. Padahal keberlanjutan progaram sangat penting untuk membangun kemuintas pengguna disabilitas.

Pustakawan juga menilai penting dukungan pengetahuan tambahan bagi staf, terutama terkait pendekatan terhadap tiap jenis diabilitas. Pemahaman ini di butuhkan agar pelayanan dapat disesuaikan dengan karakteristik pengguna. Sebagaimana di jelaskan , pendekatan berbasis empati dan persoanlisasi layanan menjadi kunci dalam menciptakan pengalaman inklusif di perpustakaan(Rifa et al., 2023)

Kendala lain yang diungkapkan adalah kurang koordinasi lintas lembaga. Misalnya, kerja sama dengan lembaga pendidikan luat biasa atau komunitas disabilitas mesih terbatas. Menurut arifin, kemitraan strategis antara perpustakaan dan lembaga disabilitas dapat memperluas jangkauan informasi serta meningkatkan kepercayaan komunitas pengguna terhadap layanan.(Arifin, 2019)

Dari hasil wawancara juga di temukan bahwa pustakawan memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya layanan inklusif. Pustakawan melihat layanan tersebut sebagai bagian dari upaya menghapus stigma dan memprkuat nilai kemanusiaan dalam ruang publik. Persepektif ini selaras dengan pandangan IFLA yang menekankan bahwa inklusivitas di perpustakaan bukan sekadar akses fisik, melainkan juga pengakuan terhadap keberagaman pengguna (Anwar & Kurniawati, 2022)

Namun semangat inklusivitas tersebut belum diimbangi dengan sistem evaluasi berbasis data. Narasumber menyebutkan bahwa data kunjungan pengguna disabilitas

memang di catata, tapi belum di analisis secara mendalam. Evaluasi berbasis data penting untuk mengidentifikasi tren pemanfaatan dan kebutuhan baru pengguna (Smith & Evans, 2020). Keterbatasan data juga menyulitkan pengambilan keputusan. Dalam konteks ini diperlukan sistem manajemen informasi yang memantau interaksi pengguna disabilitas secara berkelanjutan. Sejalan dengan penelitian oleh Sari yang mengatakan pengolahan data partisipasi pengguna inklusif dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan sesuai kebutuhan (Sari, 2021).

Dari aspek sosial, rendahnya partisipasi juga menunjukkan perlu pendekatan yang lebih humanis. Pelayanan yang sekedar berbasis fasilitas tidak cukup dibutuhkan pendekatan relasional yang menumbuhkan rasa diterima dan dihargai. Kehadiran pustakawan yang ramah, empatik, dan memahami kondisi pengguna menjadi faktor penting kenyamanan bagi penyandang disabilitas (Kurniasih, 2022).

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun fasilitas ramah disabilitas di perpustakaan nasional sudah memadai, partisipasi pengguna masih rendah karena hambatan mobilitas, komunitas, sosialisasi dan keterbatasan koleksi. Fenomena menggambarkan kesenjangan antara ketersediaan layanan dan partisipasi aktual.

Implikasi dari hasil ini menegaskan pentingnya perubahan pandangan dalam pelayanan inklusif dari sekedar menyediakan fasilitas menuju penciptaan ruang sosial bagi disabilitas, tetapi juga ruang yang mengundang keterlibatan aktif mereka sebagai pengguna dan kontributor informasi. Pembahasan

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan fasilitas ramah disabilitas di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia belum sepenuhnya mampu meningkatkan partisipasi aktif penyandang disabilitas sebagai pengguna layanan. Meskipun berbagai fasilitas aksesibel telah tersedia, tingkat pemanfaatannya masih rendah. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara inklusi struktural berupa penyediaan fasilitas fisik dan inklusi sosial yang tercermin dari keterlibatan pengguna disabilitas. Dengan demikian, inklusivitas layanan perpustakaan yang ada saat ini masih bersifat simbolik dan belum transformatif.

Rendahnya partisipasi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan mobilitas, minimnya sosialisasi layanan, serta kurangnya pelibatan komunitas disabilitas dalam perencanaan dan evaluasi layanan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa hambatan utama tidak terletak pada individu penyandang disabilitas, melainkan pada sistem dan lingkungan layanan yang belum sepenuhnya adaptif dan partisipatif.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar perpustakaan tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga memperkuat aspek nonfisik, seperti peningkatan kompetensi pustakawan, strategi sosialisasi yang inklusif, serta pelibatan aktif komunitas disabilitas dalam pengembangan layanan. Selain itu, diperlukan evaluasi kebijakan secara berkala berbasis data kunjungan pengguna disabilitas sebagai dasar perumusan kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan nyata pengguna. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan penyandang disabilitas sebagai informan utama agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap pengalaman dan kebutuhan mereka dalam layanan perpustakaan inklusif.

Referensi

- Anwar, R., & Kurniawati, D. (2022). Kompetensi pustakawan dalam pelayanan bagi penyandang disabilitas di perpustakaan umum. *Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 7(2), 115–128. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/jipi/>
- Brunskill, D. (2020). Inclusive but underused: Accessibility in public library services. *Library Management*, 41(5), 287–301. <https://doi.org/10.1108/LM-01-2020-0012>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Handari. (2019). Aksesibilitas layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Banjarnegara. *Media Pustakawan*, 26(1). <https://ejournal.perpusnas.go.id/mp/article/view/180>
- Hidayat, A. (2020). Stigma sosial terhadap penyandang disabilitas dalam akses ruang publik. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(2), 121–132. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jsh/>
- International Federation of Library Associations, & Institutions. (2021). *IFLA Guidelines for Library Services to Persons with Dyslexia and Other Reading Difficulties*. <https://www.ifla.org/publications/ifla-guidelines-for-library-services-to-persons-with-dyslexia-and-other-reading-difficulties/>
- Kurniasih, T. (2022). Pelayanan humanis di perpustakaan: Pendekatan empatik terhadap pengguna disabilitas. *Jurnal Perpustakaan Dan Layanan Informasi*, 9(2), 145–158. <https://ejournal.perpusnas.go.id/>
- Mokhtar, M. (2021). Inclusivity without participation: Challenges in library access for disabled communities. *Malaysian Journal of Library and Information Science*, 26(4), 15–29. <https://mjlis.um.edu.my/>
- Oliver, M. (1990). *The Politics of Disablement*. Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-20895-1>
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (3rd ed.). Sage Publications.
- Rifa, S. D., Rosyani, W., & Margono, H. (2023). The Urgency of Disability Services in the Library with Literature Review. *Pustakaloka*, 15(2). <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/pustakaloka/article/view/8524>
- Sandelowski, M. (2000). Whatever happened to qualitative description? *Research in Nursing & Health*, 23(4), 334–340. [https://doi.org/10.1002/1098-240X\(200008\)23:4<334::AID-NUR9>3.0.CO;2-G](https://doi.org/10.1002/1098-240X(200008)23:4<334::AID-NUR9>3.0.CO;2-G)
- Sari, Y. (2021). Pengelolaan data partisipasi pengguna inklusif dalam pengembangan kebijakan perpustakaan. *Jurnal Informasi Dan Data Publik*, 3(2), 56–70.
- Smith, J., & Evans, P. (2020). Data-driven evaluation in inclusive library services. *Library Management Review*, 41(5), 301–315. <https://doi.org/10.1108/LMR-02-2020-0034>